

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM  
SISTEM PEMBELIAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK  
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(STUDI KASUS PADA PT. WONOJATI WIJOYO, KEDIRI)**

Oleh:  
Puji Rahayu  
Dosen Akuntansi, Universitas Islam Kediri, Kediri  
Email : [pujir.itu\\_rara@yahoo.com](mailto:pujir.itu_rara@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*PT. Wonojati Wijoyo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penggajian dan pengolahan kayu dari jenis kayu jati hasil produksi utamanya berupa Garden Furniture. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Pembelian Dan Pengeluaran Kas Untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai”.*

*Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa sejarah perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jumlah karyawan, sistem pembelian dan pengeluaran kas, pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) serta data pembelian. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis kuesioner dan sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi dan sistem akuntansi.*

*Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perusahaan masih ada kelemahan – kelemahan sehingga perlu memisahkan bagian pembelian dengan penerimaan barang dan dokumen yang digunakan bernomor urut tercetak untuk menghindari adanya kecurangan dalam sistem pembelian, jurnal pembelian dan pengeluaran kas diselenggarakan oleh fungsi yang bersangkutan serta antar fungsi lebih aktif lagi dalam mencari informasi mengenai tanggung jawab masing – masing. Melalui sistem pengendalian intern tersebut dapat memudahkan pekerjaan masing – masing fungsi dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas serta pelaporan pajak pertambahan nilai dapat lebih efektif.*

---

*Kata kunci : sistem pengendalian intern, sistem pembelian, sistem pengeluaran kas, dan pajak pertambahan nilai.*

**ABSTRACT**

*PT. Wonojati Wijoyo is a company engaged in the field of sawmills and wood processing of this type of teak wood as its main production results Garden Furniture. Goals to be achieved by this research is to determine the "Effect of Internal Control System Implementation System In Purchasing and Accounts Payable for Reporting of Value Added Tax (VAT)".*

*Data used in this study are primary data. The primary data used in this study a history of the company, company location, organizational structure, number of employees, system purchases and cash disbursements, reporting of value-added tax (VAT) as well as purchasing data. Technical analysis of the data used in this research is descriptive qualitative with questionnaires and analyzing the internal control system which includes organizational structure and accounting system.*

*The final conclusion is that companies there are still weaknesses - weaknesses that need to separate the purchase with the receipt of goods and documents used serial number printed to avoid fraud in the purchasing system, the journal purchases and cash disbursements organized by function concerned and between functions more actively in seeking information about the responsibility of each - each. Through a system of internal control can facilitate their work - each function in the system of purchasing and disbursements as well as value-added tax reporting can be more effective.*

---

*Keywords: internal control system, purchasing system, the system of cash expenditures, and value added tax (VAT).*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin lama semakin pesat dan meluas, sehingga manajemen dituntut untuk mengetahui segala keadaan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan usahanya, baik yang terdapat dalam lingkungan perusahaan maupun diluar perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pada umumnya sangat memerlukan sistem pengendalian yang efisien dan efektif, khususnya dalam pembelian dan pengeluaran kas. Sistem pembelian dan pengeluaran kas yang tersusun dengan baik dan sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern, sangat diperlukan oleh perusahaan karena akan mengurangi adanya kecurangan dan penyimpangan, sehingga dapat memperlancar kegiatan perusahaan.

Dalam transaksi pembelian dan pengeluaran kas dengan pengusaha kena pajak (PKP) selain menerima faktur pembelian juga menerima faktur pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai bukti pungutan PPN atas barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

Faktur PPN harus sesuai dengan faktur pembelian yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) PER-13/PJ/2010. Faktur PPN yang diterima dari transaksi pembelian tersebut oleh perusahaan diakui sebagai PPN masukan, sedangkan faktur pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan pengakuannya sebagai PPN keluaran. Sebelum tanggal takwim dilakukan perhitungan antara PPN masukan dengan PPN keluaran, bila hasil perhitungan lebih banyak PPN masukan maka akan dilakukan restitusi dan jika lebih banyak PPN keluaran maka perusahaan mempunyai hutang pajak kepada negara.

PT. Wonojati Wijoyo merupakan salah satu pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan aktivitas usahanya dibidang ekspor impor. Perusahaan ini melakukan ekspor produknya berupa *garden furniture* dengan bahan baku dari kayu jati. Sedangkan perusahaan mengimpor bahan pembantu kuningan dan kain. Setiap pembelian bahan baku maupun bahan pembantu di supplier yang sudah menjadi PKP, perusahaan akan menerima faktur PPN dan dokumen pembelian. Khusus penjualan ekspor yang dilakukan PT. Wonojati Wijoyo

tidak dikenakan PPN, karena untuk ekspor dasar pengenaan pajaknya nol persen ( 0% ) sesuai dengan dasar hukum pajak pertambahan nilai.

Sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas yang ada di PT. Wonojati Wijoyo masih ada kelemahan dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga pelaporan pajak pertambahan nilai menjadi terlambat.

Maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah sistem pengendalian intern pada PT. Wonojati Wijoyo sebagai penelitian dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM SISTEM PEMBELIAN DAN PENGELUARAN KAS UNTUK PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI”**. (Studi Kasus Pada PT.Wonojati Wijoyo, Kediri).

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem Pembelian Dan Pengeluaran Kas Untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Batasan Penelitian**

Untuk menghindari supaya tidak terjadi perluasan pembahasan dan juga penelitian lebih terarah, maka penulis membatasi penelitian hanya pada Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Sistem Pembelian dan Pengeluaran Kas Dalam Palaporan Pajak Pertambahan Nilai. Data yang dianalisis peneliti yaitu data tahun 2014.

#### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Sistem

Pembelian Dan Pengeluaran Kas Untuk Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi beberapa manfaat antara lain:

##### a. Manfaat Operasional.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan penyusunan laporan PPN.

##### b. Manfaat Akademik.

Sebagai dasar memperdalam teori yang telah diperoleh dan menerapkannya di lapangan serta sebagai kajian bagi penelitian berikutnya.

#### **METODE PENELITIAN**

##### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis mengkaji dalam bidang sistem informasi akuntansi yang difokuskan pada masalah pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Wonojati Wijoyo periode 2014.

##### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah PT. Wonojati Wijoyo yang bergerak dibidang perdagangan *garden furniture* dari jenis kayu jati yang terletak di jalan Mataram No. 1, Dsn. Tawang Sari Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, Jawa Timur. Alasan penulis melakukan penelitian karena sebagai berikut :

##### a. Data yang ada dalam perusahaan tersebut layak untuk dijadikan penelitian.

##### b. Manajer perusahaan bersifat terbuka dalam memberikan informasi.

## Jenis Data dan Sumber Data

### Jenis Data

Jenis data yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah jumlah karyawan dan data pembelian.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah data tentang gambaran umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jam kerja karyawan, faktor PPN, pelaporan PPN, sistem pembelian dan pengeluaran kas.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengevaluasi untuk mendapatkan kesimpulan penelitian adalah data primer, yaitu berupa data tentang gambaran umum perusahaan, jam kerja karyawan, lokasi perusahaan, jumlah karyawan, struktur organisasi, pelaporan PPN, sistem pembelian dan pengeluaran kas serta data pembelian.

### Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan staff Gudang, staff Pembelian, Kasir dan Kepala Divisi keuangan dan Accounting PT. Wonojati Wijoyo untuk memperoleh data tentang jam kerja karyawan, lokasi perusahaan, jumlah karyawan serta pelaporan PPN.

b. Dokumentasi

Dari dokumentasi diperoleh data tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, sistem pembelian dan pengeluaran kas, faktor PPN serta data pembelian.

c. Kuisisioner

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang penerapan sistem pembelian dan sistem

pengeluaran kas untuk pelaporan PPN.

### Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti terdiri dari empat macam, yaitu :

- a. Sistem Pengendalian Intern
- b. Sistem Pembelian
- c. Sistem Pengeluaran Kas
- d. Pajak Pertambahan Nilai

### Definisi Operasional Variabel

a. Sistem Pengendalian Intern

Adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

b. Sistem Pembelian

Adalah cara-cara dalam melakukan pembelian baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan.

c. Sistem Pengeluaran Kas

Adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang terkait dan berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun konsumsi Jasa Kena Pajak.

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis diskriptif kualitatif yaitu membandingkan data yang terkumpul dari perusahaan dengan landasan teori sebagai bahan acuan dalam memberikan beberapa usulan pemecahan masalah.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Analisis kuesioner yang telah diisi oleh responden berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan PPN yang ada di perusahaan. Hasil jawaban kuesioner tersebut dikategorikan dalam penilaian sebagai berikut : jawaban “ya” sebagai kekuatan pengendalian intern perusahaan dan “tidak” sebagai kelemahan pengendalian intern perusahaan, kecuali ada pernyataan lain.
- b. Analisis Sistem Pengendalian Intern yang meliputi :
1. Struktur Organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
  2. Sistem Akuntansi pembelian dan pengeluaran kas.
  3. Pengendalian Intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas
- c. Usulan berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan PPN.
- barang, hutang, pengeluaran kas dan akuntansi.
- 2) Order permintaan pembelian (OPP) diotorisasi oleh bagian gudang.
  - 3) Setiap barang yang masuk gudang dicocokkan dengan Laporan Penerimaan Barang (LPB) untuk mengetahui barang yang masuk gudang sesuai dengan yang tercantum dalam LPB.
- b) Bagian Penerimaan Barang
- 1) Bagian penerimaan barang terpisah dengan bagian gudang, hutang, pengeluaran kas dan akuntansi.
  - 2) Laporan Penerimaan Barang (LPB) diotorisasi oleh bagian penerimaan barang.
  - 3) Setiap barang yang datang dilakukan pemeriksaan dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut kemudian membandingkan dengan tembusan Surat Pembelian (SP) sebelum dikirim ke gudang.
- c) Bagian Pembelian
- 1) Bagian pembelian terpisah dengan bagian gudang, hutang, pengeluaran kas dan akuntansi.
  - 2) Permintaan penawaran harga dilakukan melalui telepon
  - 3) Surat Pembelian (SP) diotorisasi oleh bagian pembelian
  - 4) Dilakukan pengecekan terhadap harga, syarat pembelian dan ketelitian perkalian dalam faktor pembelian
  - 5) Kadang – kadang menerima faktur PPN bersama copy faktur pembelian saat barang dikirim.
  - 6) Dilakukan pencocokan antara copy faktur pembelian, LPB, SP dan faktur pajak pertambahan nilai (PPN)
- d) Bagian Hutang
- 1) Bagian hutang terpisah dengan bagian pembelian, penerimaan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Kuesioner

Dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden dapat teridentifikasi tentang kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas, sebagai berikut :

### Kekuatan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas

- a) Bagian Gudang
- 1) Bagian gudang terpisah dengan bagian pembelian, penerimaan

- barang, gudang, pengeluaran kas dan akuntansi.
- 2) Mencocokkan copy faktur pembelian, LPB dan SP sebelum dibuatkan BKK
- e) Bagian Pengeluaran Kas
- 1) Bagian Pengeluaran Kas terpisah dengan bagian gudang, pembelian, hutang, penerimaan barang dan akuntansi.
  - 2) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan BKK sebelum dilakukan pembayaran.
  - 3) Bon Permintaan Pembayaran diotorisasi oleh bagian pengeluaran kas
  - 4) BKK distempel “lunas” setelah dilakukan pembayaran
- f) Bagian Akuntansi
- 1) Bagian akuntansi terpisah dengan bagian gudang, pembelian, hutang, penerimaan barang dan pengeluaran kas.
  - 2) Setiap transaksi pembelian dan pengeluaran kas dicatat kedalam jurnal
  - 3) Melakukan perhitungan dan pelaporan PPN
  - 4) Membuat rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo buku besar kas dengan saldo rekening koran.
  - 5) Meneliti kelengkapan dan keabsahan faktur PPN sebelum dilakukan pengkreditan atau perhitungan
- 2) LPB belum bernomor urut tercetak
- c) Bagian Pembelian
- 1) Bagian penerimaan barang belum terpisah dengan bagian pembelian
  - 2) Pembelian dilakukan bukan dari hasil seleksi penawaran harga yang menguntungkan perusahaan namun atas perintah pimpinan
  - 3) SP belum bernomor urut tercetak
  - 4) Keabsahan dan kebenaran faktur PPN yang diterima tidak diteliti dahulu sebelum diserahkan ke bagian akuntansi
  - 5) Penyerahan faktur PPN pada bagian akuntansi kadang – kadang tidak tepat waktu
  - 6) Jurnal pembelian tidak diselenggarakan oleh bagian pembelian
- d) Bagian Hutang
- 1) Tidak dilakukan pencatatan dalam buku pembantu hutang
  - 2) Tidak mencari informasi lebih lanjut tentang hutang pembelian yang sudah dibayar
- e) Bagian Pengeluaran Kas
- 1) Bukti kas keluar (BKK) tidak diotorisasi oleh bagian pengeluaran kas.
  - 2) Jurnal pengeluaran kas tidak diselenggarakan oleh bagian pengeluaran kas
  - 3) Tidak dilakukan konfirmasi pada bagian hutang untuk pelunasan hutang
  - 4) BKK belum bernomor urut tercetak
- f) Bagian Akuntansi
- 1) Menerima faktur PPN dari bagian pembelian dan pengeluaran kas
  - 2) Tidak dilakukan pencocokan antara buku besar PPN Masukan dengan SPT masa PPN.
  - 3) Penggantian faktur PPN yang tidak bisa dikreditkan dari supplier tidak diikuti oleh bagian akuntansi.

#### **Kelemahan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas**

- a) Bagian Gudang
- 1) Setiap permintaan pembelian kadang – kadang tidak dibuatkan OPP
  - 2) OPP belum bernomor urut tercetak
- b) Bagian Penerimaan Barang
- 1) Bagian penerimaan barang belum terpisah dengan bagian pembelian

### **Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas**

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas pada PT. Wonojati Wijoyo

Bagian Pembelian belum terpisah dengan bagian penerimaan barang sehingga dapat terjadi kecurangan yang merugikan perusahaan.

Sistem Akuntansi Pembelian dan Pengeluaran Kas pada PT. Wonojati Wijoyo

- a) Dokumen yang digunakan dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas belum bernomor urut tercetak masih secara manual, sehingga dokumen tersebut diragukan kebenarannya.
- b) Pencatatan jurnal pembelian dan pengeluaran kas masih dilakukan oleh bagian akuntansi sehingga bagian pembelian kesulitan mengetahui pembelian yang telah dilakukan dan bagian pengeluaran kas kesulitan mengetahui besarnya kas yang telah dikeluarkan.
- c) Bagian hutang tidak mencatat hutang perusahaan kedalam buku pembantu hutang dan tidak ada konfirmasi yang jelas dari bagian pengeluaran kas untuk pelunasan hutang sehingga bagian hutang kesulitan mengetahui saldo hutang setiap supplier.

Pengendalian Intern Dalam Sistem Pembelian Dan Pengeluaran Kas PT. Wonojati Wijoyo

- a) Struktur Organisasi  
Adanya pemisahan fungsi yang terkait seperti bagian Akuntansi, bagian pembelian, bagian hutang, bagian gudang dan pengeluaran kas.
- b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas
  - 1) Order Permintaan Pembelian diotorisasi oleh bagian gudang

- 2) Surat Pembelian diotorisasi oleh bagian pembelian
  - 3) Laporan Penerimaan Barang diotorisasi oleh bagian penerimaan barang
  - 4) Bukti Kas Keluar diotorisasi oleh bagian hutang
  - 5) Bukti Permintaan Pembayaran diotorisasi oleh Kasir
  - 6) Cek diotorisasi oleh direktur keuangan
  - 7) Pengawasan pengendalian intern dilakukan dengan cara membandingkan jurnal pembelian dengan jurnal pengeluaran kas.
- c) Praktek-praktek yang sehat terhadap sistem pembelian dan pengeluaran kas
- 1) Pelaksanaan transaksi pembelian hingga pelaporan PPN dilakukan oleh lebih dari satu bagian.
  - 2) Setiap barang yang masuk gudang dicocokkan dengan Laporan Penerimaan Barang (LPB) untuk mengetahui barang yang masuk gudang sesuai dengan yang tercantum dalam LPB.
  - 3) Adanya pengecekan kelengkapan dan keabsahan faktur PPN yang diterima yang dilakukan oleh bagian akuntansi untuk menghindari kesalahan pada saat pengkreditan PPN.
  - 4) Adanya cap "lunas" pada BKK sebagai bukti telah dilakukan pelunasan kewajiban.
- d) Karyawan yang terlibat dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas  
Pada PT. Wonojati Wijoyo, karyawan yang terlibat dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas diangkat berdasarkan pengalaman kerja yang berkaitan dalam bidang pembelian dan bidang pengeluaran kas.

**Usulan berkaitan dengan penerapan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan PPN**

Memperbaiki struktur organisasi

Struktur organisasi yang diusulkan penulis tidak jauh berbeda dari struktur organisasi perusahaan PT. Wonojati Wijoyo. Penulis hanya menambahkan bagian penerimaan barang dan memisahkan fungsi pembelian dengan penerimaan barang sehingga bagian pembelian lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dalam transaksi pembelian, sedangkan bagian penerimaan barang bertanggung jawab dalam mengecek barang datang dan mengotorisasi Laporan Penerimaan Barang (LPB).

Usulan perbaikan sistem wewenang dan prosedur pencatatan terhadap sistem pembelian dan pengeluaran kas.

- a) Dokumen bernomor urut tercetak
- b) Jurnal Pembelian diselenggarakan oleh bagian pembelian berdasarkan Laporan Penerimaan Barang (LPB) lembar ke 1 dari bagian penerimaan barang sehingga memudahkan bagian pembelian mengetahui data pembeliannya.
- c) Jurnal Pengeluaran Kas diselenggarakan oleh bagian kasir berdasarkan Bukti Kas Keluar (BKK) yang sudah di cap lunas sehingga memudahkan bagian pengeluaran kas untuk mengetahui kas yang telah dikeluarkan.
- d) Jurnal pembelian dan pengeluaran kas setiap akhir bulan dilaporkan pada bagian akuntansi untuk diposting kedalam buku besar.
- e) Bukti kas keluar (BKK) diselenggarakan oleh bagian pengeluaran kas agar terkontrol pencatatannya.
- f) Menambahkan dokumen Mutasi Pembayaran Hutang (MPH) untuk penyerahan dokumen permintaan pembayaran (copy faktur pembelian,

Surat Jalan, dan LPB) dari bagian hutang kepada bagian pengeluaran kas.

- g) Menambahkan kartu hutang pembelian yang diselenggarakan oleh bagian hutang untuk mengetahui saldo hutang setiap supplier.

Usulan perbaikan praktek-praktek yang belum sehat

- a) Menghindari perangkapan jabatan yang terjadi dibagian penerimaan barang dan pembelian.
- b) Pembelian yang sifatnya sangat mendesak seperti pembelian spare part mesin produksi yang tidak distok dalam gudang dan tidak dimungkinkan untuk menunggu waktu lama dibuatkan order permintaan pembelian setelah barang datang atau OPP menyusul sehingga setiap pembelian dapat dikontrol dengan OPP.
- c) Surat pembelian dibuat berdasarkan hasil seleksi penawaran harga dari supplier yang menguntungkan perusahaan
- d) Faktur pajak pertambahan nilai yang diterima setelah pelunasan diberikan kepada bagian pembelian terlebih dahulu sebelum diberikan pada bagian akuntansi, sehingga faktur PPN Masukan yang diterima dapat dikontrol oleh bagian pembelian.
- e) Bagian pembelian mengecek keabsahan dan kebenaran faktur PPN sebelum diberikan pada bagian akuntansi. Faktur PPN minimal harus memuat Identitas ( Nama, Alamat, NPWP) yang menyerahkan dan menerima BKP atau JKP tercantum secara jelas, jenis barang atau jasa yang dikenakan PPN, jumlah harga atau penggantian dan potongan harga sesuai dengan faktur pembelian, tercantum nominal PPN yang dipungut, kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur PPN,

- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur PPN.
- f) Bagian Kasir melakukan konfirmasi kepada bagian hutang untuk pelunasan hutang pembelian agar bagian hutang bisa mengontrol hutang pembelian yang belum dilunasi.
  - g) Bagian akuntansi mencocokkan buku besar PPN masukan dengan SPT masukan setiap bulan sehingga dapat teridentifikasi faktur PPN yang belum dilaporkan.
- Bagian akuntansi melakukan konfirmasi kepada bagian pembelian untuk faktur PPN yang belum diterima sehingga bagian pembelian dapat meminta faktur PPN yang belum dikirim oleh supplier, langkah ini bisa menghindari keterlambatan penerimaan faktur PPN.

Karyawan yang berkualitas

Penempatan karyawan hendaknya sesuai dengan kemampuan karyawan serta dari hasil seleksi penerimaan karyawan seperti test, interview dan bukan hanya pada pengalaman kerja pada bidangnya saja. Karyawan yang terkait dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan PPN diharapkan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, mempunyai etika yang baik serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di PT. Wonojati Wijoyo, serta berdasarkan hasil pembahasan dan pemecahan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Wonojati Wijoyo, Kediri masih memerlukan perbaikan, karena masih ditemukan adanya beberapa

kelemahan diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak adanya pemisahan fungsi antara bagian pembelian dengan bagian penerimaan barang
  2. Kurang adanya komunikasi antar fungsi yang terkait misalnya bagian pengeluaran kas dengan bagian hutang tentang pelunasan hutang serta bagian akuntansi dengan bagian pembelian mengenai faktur pajak yang belum diterima
  3. Penyelenggaraan jurnal pembelian dan pengeluaran kas yang belum tepat.
  4. Dokumen yang digunakan belum bernomor urut tercetak.
- b. Pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan PPN yang telah dilakukan PT. Wonojati Wijoyo, yaitu Bukti Kas Keluar (BKK) di cap "lunas" sesudah dilakukan pembayaran dan diadakan pengecekan terhadap faktur PPN mengenai keabsahan dan kebenarannya yang diterima oleh bagian akuntansi sebelum dilakukan pengkreditan.

### Saran

Disini penulis mencoba memberikan saran – saran dengan harapan dapat memberi manfaat bagi PT. Wonojati Wijoyo, dalam meningkatkan pengendalian intern, khususnya sistem pembelian dan pengeluaran kas agar pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) dapat lebih efektif. Saran – saran yang diberikan antara lain :

- a. Sebaiknya semua penerimaan faktur PPN terpusat pada bagian pembelian sehingga dapat dilakukan pengendalian.
- b. Sebaiknya antar fungsi diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi mengenai tanggung jawab masing-masing sehingga memudahkan dalam pengendalian.

- c. Sebaiknya dilakukan rolling antar bagian agar tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan.
- d. Sebaiknya adanya pemisahan fungsi antara bagian penerimaan barang dengan bagian pembelian sehingga bagian pembelian lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya dan menghindari adanya penyimpangan dan kecurangan.
- e. Sebaiknya jurnal pembelian diselenggarakan oleh bagian pembelian sehingga memudahkan bagian pembelian dalam melihat data pembeliannya dan jurnal pengeluaran kas diselenggarakan oleh kasir sehingga memudahkan kasir dalam merinci besarnya kas yang telah dikeluarkan.
- f. Bagian hutang dagang membuat mutasi pembayaran hutang (MPH) dan kartu hutang untuk mempermudah mengetahui saldo hutang perusahaan.
- g. Bagian akuntansi mencocokkan buku besar PPN dengan SPT masa PPN setiap bulan sehingga dapat teridentifikasi faktur PPN yang belum dilaporkan.
- h. Dokumen yang digunakan bernomor urut tercetak untuk menghindari kecurangan dan penyimpangan.
- i. Bagi peneliti selanjutnya bisa dikembangkan ruang lingkup penelitian karena dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji bidang sistem informasi akuntansi yang difokuskan pada masalah pengaruh penerapan sistem pengendalian intern dalam sistem pembelian dan pengeluaran kas untuk pelaporan pajak pertambahan nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki (2002), *Sistem Akuntansi*, Edisi Kelima, Yogyakarta : BPF – Yogyakarta.
- Bodnar, George H. dan William S. Hopwood.(1995), *Sistem Informasi Akuntansi* (Jilid I). Terjemahan : Amir Abadi Jusuf (2001), Jakarta: Salemba Empat.
- Kusnanto (2009), *Sistem Informasi Akuntansi* (Jilid 1), Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016, Yogyakarta : Andi.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi ( 2001 ), *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat.
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Yogyakarta : Erlangga.
- Resmi, Siti. (2014), *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Edisi Kedelapan, Buku Satu, Jakarta : Salemba Empat.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart.(2003), *Accounting Information System* (Jilid 2). Terjemahan : Deny Arnos Kwaary dan Dewi Fitriyani (2005), Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. (2015), *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat.

- Soekrisno, Agoes Dan Erlita. (2014), *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Kedua, Jakarta : Salemba Empat.
- Suandy, Erly (2009). *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna (2015), *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Malang : Bayumedia Publising.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Waluyo (2013), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kesebelas, Jakarta : Salemba Empat.
- Widjajanto, Nugroho (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.